

KETAHANAN NASIONAL INDONESIA

Sayidiman Suryohadiprojo

Konsep Ketahanan Nasional pada dasarnya mirip konsep keamanan komprehensif yang telah kita bahas pada tulisan terdahulu¹. Kemiripan tersebut, terutama terletak pada sifatnya yang bersifat semesta atau total. Akan tetapi berbeda dengan konsep keamanan komprehensif, konsep Ketahanan Nasional merupakan konsep yang lebih luas cakupannya. Jika Keamanan Komprehensif semata-mata digunakan untuk menghadapi satu benturan fisik dengan luar negeri, maka Ketahanan Nasional di samping digunakan untuk menghadapi agresi dari luar, juga dimaksudkan untuk mengatasi seluruh tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan yang dialami satu bangsa dalam memperjuangkan kepentingan nasional dan kelangsungan hidupnya.

Konsep Ketahanan Nasional lahir dan berkembang di Indonesia. Mula-mula konsep tersebut dikembangkan oleh para perwira TNI yang terlibat dalam perjuangan Perang Kemerdekaan serta berbagai masalah keamanan dalam negeri lainnya, khususnya yang kemudian bertugas di lingkungan Lembaga Pertahanan Nasional dan LEMHANNAS (kemudian diganti menjadi Lembaga Ketahanan Nasional dengan singkatan yang sama). Karena perwira-perwira TNI itu dalam masa penjajahan mengalami pendidikan Belanda, maka semula digunakan istilah Belanda *nationale*

weerbaarheid. Istilah itu mengandung makna bahwa bangsa Indonesia harus tahan terhadap aneka ragam guncangan dan ancaman. Hal itu tidak terkandung dalam pengertian pertahanan, sebab pertahanan hanya menyangkut satu usaha yang bersifat militer. Walaupun pertahanan merupakan salah satu bagian dari *weerbaarheid* namun *weerbaarheid* jauh lebih luas dalam perkembangannya, kemudian ditetapkan untuk menggunakan istilah ketahanan sebagai padanan istilah *weerbaarheid*, sehingga *nationale weerbaarheid* menjadi ketahanan nasional.

1 Untuk mengetahui konsep keamanan komprehensif sebagaimana yang dimaksud lihat bagian pertama dari tulisan ini yang dimuat dalam *Jurnal Ketahanan Nasional*, No. 1. Vol. I. Desember 1996.

Penulis (Let. Jen. Purn.) pernah menjabat Dubes Keliling RI Wilayah Afrika, Dubes Jepang dengan berbagai Tanda Penghargaan dan Karya Tulis. Kini Penasehat Menristek dan Anggota Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional.

Ketahanan nasional mengandung makna adanya kondisi dinamis suatu bangsa, berisikan keuletan dan ketangguhan, yang membentuk kekuatan nasional yang mampu menghadapi dan mengatasi setiap macam ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam negeri, secara langsung atau tidak langsung membahayakan kelangsungan hidup bangsa serta pencapaian tujuan nasionalnya.

Kondisi dinamis bangsa seperti itu harus meliputi seluruh aspek kehidupan bangsa, baik yang bersifat alamiah maupun yang bersifat sosial. Aspek yang bersifat alamiah pada dasarnya terdiri dari aspek geografi, aspek penduduk dan aspek kekayaan alam. Sedangkan aspek yang bersifat sosial terdiri atas aspek ideologi, aspek politik, aspek ekonomi, aspek sosial-budaya dan aspek pertahanan keamanan.

Ketahanan nasional meliputi kesejahteraan nasional dan keamanan nasional, yaitu dua pengertian yang dapat dibedakan tetapi tak dapat dipisahkan, seakan-akan dua sisi dari satu mata uang. Oleh karena itu jika kita bicara tentang ketahanan nasional mau tidak mau kita bicara tentang kesejahteraan nasional dan keamanan nasional. Bisa saja dalam tahap tertentu titik berat kehidupan bangsa diletakkan pada keamanan nasional. Akan tetapi penempatan

titik berat pada kesejahteraan nasional, tidak berarti boleh mengabaikan sama sekali keamanan nasional, demikian sebaliknya. Itu berarti bahwa suatu bangsa harus selalu memperhatikan kesejahteraan nasional maupun keamanan nasional, sekalipun tingkat perhatian itu tidak selalu sama. Dengan kata lain, perlu diusahakan keselarasan antara kesejahteraan nasional dengan keamanan nasional.

Pengalaman bangsa Indonesia dalam perjuangan kemerdekaannya dan ketika harus menghadapi berbagai masalah keamanan dalam negeri membuktikan pentingnya pengertian di atas. Pengalaman bangsa asing, juga memberikan bahan untuk sampai kepada pikiran itu. Hal ini, misalnya, ditunjukkan oleh kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua. Meskipun Jepang mempunyai kekuatan militer yang dengan cepat dapat merebut Asia Tenggara dari tangan Amerika, Inggris, Perancis dan Belanda, namun kemudian ia tidak mampu mempertahankan perolehannya itu lebih lama. Sebab Jepang tidak mempunyai kekuatan industri yang dapat mengimbangi industri AS.

Sebaliknya karena kokohnya ketahanan nasional yang dimilikinya Indonesia dapat memaksa Belanda mengakui kedaulatan bangsa Indonesia, padahal Belanda jauh lebih maju dalam ekonomi dan industri serta organisasi militernya. Kenyataan itu menunjukkan kondisi

dinamis yang dimiliki bangsa Indonesia, termasuk keuletannya dan ketangguhannya, terutama keuletan rakyat dan angkatan bersenjata yang pantang menyerah dan adanya ketangguhan diplomasi yang dapat mengajak negara lain memberikan bantuan, akhirnya mampu memaksa Belanda untuk mengakui kedaulatan bangsa Indonesia. Padahal sebetulnya kekuatan militer Belanda masih cukup lengkap, tetapi sudah tidak mampu mencapai tujuan politik bangsanya.

Para pemrakarsa konsep ketahanan nasional beranggapan bahwa bangsa dan negara Republik Indonesia perlu mempunyai ketahanan yang memadai. Hal ini mengingat perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan nasionalnya, yaitu terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila, masih panjang dan akan terus menghadapi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan. Fakta menunjukkan bahwa cukup banyak bangsa lain yang kepentingannya tidak sama atau bahkan bertentangan dengan kepentingan Republik Indonesia. Hal itu sudah dialami bangsa Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945. Bahkan ada sementara orang Indonesia sendiri yang kepentingannya berbeda dengan kepentingan Nasionalnya. Misal, tidak semua orang yang menyetujui kemerdekaan Indonesia cocok dengan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Me-

reka dapat menerima Republik Indonesia merdeka, tetapi dengan dasar negara yang berbeda dari Pancasila. Pihak-pihak itu sejak semula menimbulkan berbagai kesulitan bagi bangsa Indonesia. Semua itu harus dapat dihadapi dan diatasi dengan efektif agar Republik Indonesia tetap hidup dan tujuan nasional dapat dicapai.

Untuk menghadapi dan mengatasi berbagai ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan itu, bangsa Indonesia harus dapat menjaga kemandiriannya, tidak tergantung pada bantuan yang diberikan pihak lain. Sebab kalau tergantung pada bantuan pihak lain, kemerdekaan bangsa menjadi hilang. Bangsa Indonesia, memasuki kemerdekaannya, sebagai bangsa yang miskin dan terbelakang sebagai akibat penjajahan. Oleh sebab itu, bangsa Indonesia sukar untuk mengharapkan kekuatan materi dan uang. Karena itu segala aspek kehidupan bangsa harus dapat dikerahkan untuk menghasilkan kekuatan nasional yang diperlukan guna menghadapi berbagai kesulitan itu. Dan segala aspek kehidupan itu diintegrasikan menjadi satu kekuatan yang manunggal.

Pengalaman bangsa Indonesia, dan bangsa-bangsa lain di dunia, membuktikan bahwa kekuatan rakyat amat penting artinya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kekuatan rakyat itu, sebaiknya, didukung oleh kehidupan rakyat yang cukup sejahtera dan

maju dalam segi materinya. Sebab kalau rakyat cukup sejahtera, ia juga lebih sehat dan lebih mampu untuk mengembangkan aneka ragam kekuatan. Karena itu perwujudan ketahanan nasional harus mengandung usaha untuk menciptakan kesejahteraan rakyat yang tinggi.

Walaupun demikian, harus diwaspadai agar kesejahteraan lahiriah itu tidak justru menimbulkan kelemahan batin. Hal ini mengingat tidak jarang rakyat yang tinggi kesejahteraannya tidak mempunyai lagi keuletan dan ketanggahan, dan dalam tubuhnya sebenarnya telah menjadi lemah karena kurang ada *elan* atau semangat hidup yang memadai. Karena itu, yang perlu diwujudkan tidak cukup hanya kekuatan ideologi, kekuatan politik, kekuatan ekonomi, kekuatan budaya, kekuatan sosial, kekuatan pertahanan-keamanan, melainkan juga harus ketahanan ideologi, ketahanan politik, ketahanan ekonomi, ketahanan budaya, ketahanan sosial dan ketahanan pertahanan-keamanan.

Jadi membangun ketahanan nasional bukanlah semata-mata membangun kekuatan fisik (*physical power build-up*), melainkan juga kekuatan yang mengandung faktor moral dan spiritual. Hal ini mengingat ketahanan nasional tidak hanya bersandar pada kekuatan dan kekuasaan. Oleh sebab itu, membangun ketahanan nasional tidak hanya dapat dilakukan oleh bang-

sa dan negara yang sudah kaya dan maju, tetapi juga oleh bangsa yang sedang berkembang seperti Indonesia. Dengan demikian, dapat dimengerti jika Indonesia berpandangan bahwa negara-negara sedang berkembang tidak perlu dan tidak harus menjadi pengikut negara kaya dan minta perlindungannya dalam menjaga keamanannya.

Para pemrakarsa berpendapat bahwa dalam realisasi ketahanan nasional itu lebih diutamakan sikap mawas ke dalam. Maksudnya adalah agar kita sebagai bangsa senantiasa bersedia dan mampu mawas diri serta secara saksama memperhatikan kondisi internal bangsa kita sendiri. Akan tetapi itu tidak berarti bahwa bangsa Indonesia tidak memperhatikan dunia sekelilingnya. Untuk dapat menciptakan ketahanan nasional yang tangguh di semua bidang, justru bangsa Indonesia harus selalu bersedia dan mampu melihat secara teliti dan obyektif perkembangann bangsa-bangsa lain. Dengan mengembangkan ketahanan nasional yang meliputi semua aspek kehidupan bangsa, diusahakan terwujudnya kewibawaan nasional yang memancar ke dunia keliling. Jadi dalam konteks ini, yang diharapkan tidak hanya satu proyeksi kekuatan lahir saja, melainkan satu pancaran kekuatan lahir dan batin. Hal demikian diharapkan menjadi faktor penangkal bagi semua pihak yang bermaksud berbuat sesuatu yang merugikan negara dan bangsa In-

donesia. Kewibawaan ini pada akhirnya sekaligus mengandung kemampuan mengembangkan daya saing di setiap bidang ketika menghadapi dunia luar.

Ketahanan nasional harus bersifat dinamis, tidak statis, selalu dapat disesuaikan dengan perkembangan keadaan internasional dan bangsa sendiri. Kondisi tertentu yang ada pada suatu bangsa mungkin sudah menunjukkan adanya ketahanan nasional yang memadai. Akan tetapi kalau diterapkan pada masa lain belum tentu kondisi itu sudah memadai. Oleh karena itu, harus senantiasa diadakan penilaian keadaan, baik internasional maupun nasional, agar ada perwujudan kondisi yang tepat.

Dengan gambaran di atas, jelas sekali bahwa konsep ketahanan nasional mirip konsep keamanan komprehensif, walaupun tetap ada perbedaannya. Konsep ketahanan nasional keamanan dan kesejahteraan tidak dapat dipisahkan satu sama lain, sedangkan konsep keamanan komprehensif tidak secara eksplisit menyatakan begitu. Faktor moralitas dan kewibawaan sebagai hasil mawas ke dalam merupakan inti konsep ketahanan nasional, sedangkan konsep keamanan komprehensif kurang menyinggung hal itu. Sebaliknya konsep keamanan komprehensif cenderung menuju kepada pembentukan kekuasaan (*power build-up*) sebagai inti realisasinya.

Konsep keamanan komprehensif biasanya dilakukan oleh suatu negara untuk ditujukan kepada negara lain. Oleh karena itu, pelaksanaan keamanan komprehensif cenderung untuk merangsang negara yang menjadi sasaran untuk mempunyai "konsep balasan". Akibatnya mudah terjadi persaingan kekuasaan yang mengarah ke konflik kekuasaan (*power conflict*). Sedangkan ketahanan nasional terutama melihat ke dalam, tidak tertuju kepada siapa pun. Karena itu juga tidak mengundang terjadinya persaingan dan konflik kekuasaan. Membentuk ketahanan nasional dapat disamakan dengan seorang yang belajar bela diri, ia tidak mempunyai musuh tertentu dalam pikirannya dan hanya membentuk kesiapan kalau-kalau ada orang yang menggangukannya. Karena itu, keamanan komprehensif biasanya hanya dilakukan oleh negara yang cukup kaya dan kuat ekonominya, agar dapat menghasilkan kekuatan fisik yang menjadi andalan konsep itu. Sedangkan ketahanan nasional dapat dibentuk oleh setiap negara dan bangsa, baik yang kaya maupun yang masih miskin.

Wujud Ketahanan Ideologi

Setelah kita secara umum membicarakan konsep Ketahanan Nasional, maka sekarang perlu kita gambarkan bagaimana wujud ketahanan nasional Indonesia yang

ingin dicapai.

Sudah menjadi kesepakatan bangsa Indonesia untuk menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat. Itu berarti bahwa Pancasila menjadi jalan hidup kita, *way of life* kita, yang harus selalu kita pelihara dan tingkatkan mutunya.

Dalam dinamika kehidupan umat manusia sekarang, Pancasila mengalami berbagai tantangan, hambatan dan gangguan, baik dari luar maupun dalam negeri. Dari luar negeri karena ada pihak-pihak yang ingin mempromosikan pandangan hidupnya untuk berlaku bagi seluruh umat manusia, termasuk di lingkungan bangsa Indonesia. Dari dalam negeri, karena masih ada orang-orang yang tidak setuju dengan kesepakatan untuk menjadikan Pancasila satu-satunya asas kehidupan bangsa, akibat terkena pengaruh dari luar negeri atau mereka mengembangkan pandangan hidupnya sendiri. Mereka ini menginginkan agar pandangan hidup yang mereka anut menjadi asas kehidupan bangsa.

Pancasila harus mempunyai cukup ketahanan untuk menghadapi dan mengatasi seluruh tantangan itu. Hal itu sudah tentu tidak akan tercapai hanya dengan membicarakan Pancasila secara muluk. Mendiskusikan Pancasila seperti dalam penataran tentu banyak manfaatnya, karena dapat membuka pikiran orang secara le-

bih luas dan mendalam tentang nilai-nilai Pancasila. Namun tindakan seperti itu juga harus diikuti oleh usaha untuk menjadikan nilai-nilai Pancasila menjadi kenyataan hidup (*living realities*) dalam masyarakat Indonesia.

Ketika Pancasila menjadi kenyataan hidup, tidak tertutup kemungkinan bahwa dalam kehidupan bangsa Indonesia ada kelemahan yang disebabkan oleh interpretasi tertentu terhadap nilai-nilai Pancasila. Timbulnya kelemahan itu, misalnya, karena kita selalu membandingkan kehidupan di Indonesia dengan yang terjadi di luar kita, khususnya dalam hubungan kesejahteraan rakyat dan keamanan nasional. Kalau ternyata terwujud satu kondisi dalam kehidupan bangsa Indonesia yang mengurangi kesejahteraan rakyat dan keamanan nasional, maka kita harus bersedia dan mampu melakukan reinterpretasi ajaran Pancasila. Bukan ajaran dan nilai Pancasila yang kita ubah, melainkan interpretasinya yang kita tinjau kembali untuk menghasilkan kondisi yang lebih sesuai dengan kebutuhan. Inilah yang dimaksud Pancasila sebagai ideologi yang bersifat terbuka dan bersifat dinamis, tidak kaku atau *rigid* seperti ideologi komunis.

Dengan bersifat terbuka dan dinamis, Pancasila akan mempunyai ketahanan tinggi terhadap berbagai tantangan. Salah satu penyebab jatuhnya ideologi komunis adalah, karena ideologi tersebut bersifat

kaku dan terlalu doktriner. Doktrin memang diperlukan untuk pedoman pemikiran, tetapi doktrin tidak boleh kaku dalam pelaksanaannya. Sebaliknya doktrin juga tidak boleh terlalu kenyal atau fleksibel, sebab kalau terlalu kenyal bisa saja kita lepas dari pedoman Pancasila. Dengan mengambil sikap terbuka, tidak kaku dan dinamis dalam memelihara dan mengimplementasikan Pancasila, maka kita akan memperoleh satu kondisi bangsa yang dinamis dan ulet serta tangguh.

Keadaan sekarang masih jauh dari memuaskan. Penataran yang dilakukan secara luas, hal mana adalah baik, tidak atau kurang disertai pengamalan dari segala hal yang didiskusikan dalam penataran. Akibatnya adalah bahwa Pancasila masih belum merupakan kenyataan hidup. Malahan tidak jarang justru sikap dan pandangan hidup lain yang berbeda atau bertentangan dengan Pancasila memperoleh perhatian lebih besar, juga dari orang-orang yang duduk dalam pemerintahan dan perwakilan rakyat. Contohnya adalah kuatnya arus kapitalisme, terutama setelah blok Barat menang dalam Perang Dingin. Sebaliknya, ada pula yang bersikap terlalu tertutup dan kaku dalam menginterpretasikan nilai-nilai Pancasila, sikap mana juga tidak menguntungkan bagi ketahanan Pancasila.

Kalau kondisi ini tidak diperbaiki, padahal pandangan hidup

kapitalisme sangat agresif, terutama setelah memenangkan Perang Dingin, tidak mustahil bangsa Indonesia dan Pancasila akan mengalami banyak persoalan di masa depan. Sekalipun banyak orang mengatakan bahwa sekarang ideologi sudah tidak ada (*ideology is dead*), tetapi dalam kenyataan tidak demikian.

Wujud Ketahanan Politik

Ketahanan politik menyangkut politik dalam negeri dan politik luar negeri. Keduanya sama pentingnya bagi ketahanan nasional Indonesia.

Politik dalam negeri Indonesia terutama merupakan perwujudan sistem politik yang dinamakan demokrasi Pancasila. Yang dimaksud demokrasi Pancasila adalah sistem politik sebagaimana tercantum dan dijelaskan dalam UUD 1945 serta Penjelasannya. Itu berarti bahwa yang menjadi inti kehidupan politik dalam negeri adalah realisasi kedaulatan rakyat dalam menyelenggarakan Republik Indonesia untuk mencapai tujuan nasionalnya. Dengan demikian, kalau kita bicara tentang ketahanan politik dalam negeri, maka yang menjadi perhatian kita adalah bahwa demokrasi Pancasila berfungsi sebagaimana mestinya dan tidak digoyahkan oleh sistem politik lain atau pemikiran yang hendak mengubahnya menjadi sistem politik yang berbeda.

Memang ada kecenderungan

dari negara tertentu untuk mempengaruhi bangsa-bangsa lain agar mengikuti sistem politiknya. Negara itu merasa mempunyai kewajiban untuk mengajak bangsa lain berbuat demikian, karena ia menganggap bahwa sistem politiknya adalah terbaik dan mempunyai kemampuan terbesar untuk mendatangkan kebahagiaan kepada manusia. Hal itu kita alami dengan kuat sekali ketika Uni Soviet masih menjadi pelopor dunia komunis. Ia mengumandangkan kebenaran dan kehebatan sistem politiknya bagi seluruh umat manusia, serta berusaha keras untuk mempengaruhi negara lain untuk juga mengikuti sistem komunis. Akan tetapi ia gagal dalam konfrontasinya dengan dunia Barat yang mengumandangkan pendapat bahwa yang terbaik adalah sistem kapitalisme dan liberalisme. Sebelum ia gagal dalam konfrontasi globalnya terhadap dunia Barat, di Indonesia ia sudah gagal lebih dulu.

Setelah Perang Dingin usai dengan kemenangan blok Barat, maka berganti sekarang Amerika Serikat yang paling gigih mempropagandakan sistem politiknya ke seluruh dunia, dengan alasan bahwa kemenangannya atas blok komunis menunjukkan keunggulan sistem politik Barat yang intinya adalah kapitalisme. Demokrasi Pancasila yang dahulu mengalami desakan dari pihak komunis, sekarang terus merasakan tekanan dari dunia Barat.

Desakan dan dorongan itu tidak hanya datang dari luar negeri, tetapi juga karena usaha orang Indonesia sendiri. Uni Soviet maupun sekarang Amerika Serikat sejak dahulu berusaha mencapai tujuannya dengan memanfaatkan orang Indonesia yang dapat diajak untuk mencapai tujuan mereka. Walaupun gagal, hal itu dibuktikan ketika Amerika Serikat mendukung pemberontakan PRRI/Permesta. Sekarang ketika komunisme tidak lagi menjadi persoalan bagi dunia Barat dan Amerika Serikat khususnya, gerakan AS untuk mempengaruhi umat manusia menjadi makin kuat. Hal ini juga erat kaitannya pandangan Amerika Serikat bahwa hal itu manfaatnya untuk kepentingan daya saing ekonominya.

Maka dapat dikatakan bahwa ketahanan politik dalam negeri dipengaruhi oleh kemampuan bangsa Indonesia mengatasi dorongan dunia Barat, khususnya dengan meniadakan pengaruh terhadap orang Indonesia yang cenderung mendukung sistem politik lain.

Karena Barat, khususnya Amerika Serikat, selalu menggunakan isu demokrasi dan hak azasi manusia untuk menekan Indonesia, maka untuk menghilangkan tekanan itu Indonesia harus membuktikan bahwa di Indonesia sudah berlaku dan terwujud kehidupan demokrasi dan hak azasi manusia, meskipun tidak sepenuhnya sama seperti yang dikehendaki Amerika Serikat. Memang

demokrasi Pancasila tidak sepenuhnya sama dengan demokrasi yang diterapkan di Amerika Serikat, tetapi inti pengertian demokrasi adalah sama, yaitu berlakunya kedaulatan rakyat. Perbedaannya adalah terletak pada pelaksanaan kedaulatan rakyat itu, yang di Indonesia mengutamakan musyawarah dan mufakat di samping menggunakan pemungutan suara. Sedangkan di Amerika Serikat dilakukan semata-mata atas dasar suara terbanyak. Jika kedaulatan rakyat di Indonesia sudah berlaku, tidak ada hak bagi negara mana pun untuk mengatakan bahwa di Indonesia tidak ada demokrasi. Bahwa di Indonesia diutamakan musyawarah dan mufakat adalah sesuai dengan sikap budaya yang dianut bangsa Indonesia, sebagaimana di AS berlakunya suara terbanyak akibat dari sikap bangsanya yang menganut pandangan individualisme. Di Jepang pun sistem demokrasinya tidak dapat lepas dari faktor budayanya dengan mengutamakan unsur *nemawashi* yang mirip musyawarah mufakat. Perbedaan ini tidak menjadikan sistem demokrasi di Amerika Serikat lebih unggul atau lebih demokratis ketimbang sistem demokrasi Pancasila di Indonesia serta sistem demokrasi Jepang.

Demikian pula mengenai hak azasi manusia, bangsa Indonesia harus membuktikan bahwa Indonesia sudah menjalankan hal itu sesuai dengan nilai sila kedua. Bah-

wa pelaksanaannya tidak sepenuhnya sama dengan Amerika Serikat tidak berarti bangsa Amerika Serikat lebih unggul dalam mempraktekkan sikap kemanusiaan ketimbang bangsa Indonesia.

Jadi yang terpenting, untuk menegakkan ketahanan politik dalam negeri terhadap tantangan dari luar, adalah implementasi dari nilai-nilai dan ketentuan yang sebenarnya sudah dimiliki bangsa Indonesia, yaitu dalam Pancasila dan UUD 1945.

Untuk meniadakan pengaruh terhadap orang Indonesia yang cenderung memihak sistem politik asing dan berusaha menjadikan pikirannya suatu kenyataan di Indonesia, harus diusahakan agar semua organisasi sosial politik bebas dari kehendak dan unsur yang mempunyai kecenderungan itu. Dalam hal ini, berlakunya secara efektif demokrasi Pancasila dan kondisi kemanusiaan yang baik mempunyai pengaruh yang positif untuk menjauhkan organisasi sosial politik dari kecenderungan negatif itu. Selain itu, diusahakan agar orsospol dapat hidup mandiri, terutama dalam aspek keuangannya. Bagaimanapun, tanpa adanya kemandirian keuangan sulit diharapkan suatu partai politik dapat mandiri. Ini berarti besar peluang bagi partai semacam itu untuk mudah dipengaruhi oleh pihak lain.

Sulit mencegah adanya orang Indonesia terpengaruh oleh pihak luar. Akan tetapi jumlah orang

yang terpengaruh itu dapat dibatasi seminim mungkin sehingga tidak menimbulkan kelemahan dan kerawanan politik Indonesia. Untuk itu pemerintah harus dapat menunjukkan pekerjaan yang sebaik mungkin, terutama dalam hal efektivitas menjalankan fungsi-fungsinya dan perilaku yang jujur dan bersih dari aparat pemerintah (*effective and clean government*). Kalau hal itu terlaksana, mayoritas rakyat lebih suka untuk mendukung pemerintahannya sendiri ketimbang memihak pendapat bangsa lain yang belum tentu dapat menghasilkan keadaan yang lebih baik bagi rakyat. Jika mayoritas rakyat suka kepada kondisi bangsa yang ada, meskipun tentu tidak pernah puas seratus persen, maka terpengaruh pihak luar sulit memperoleh dukungan rakyat banyak.

Berlakunya kekuasaan hukum amat penting untuk memelihara kepercayaan rakyat kepada kondisi bangsa sendiri. Kesalahan dan pelanggaran dikenakan sanksi yang jelas, sehingga terasa adanya keadilan bagi rakyat yang berbuat baik. Demikian pula adanya kebebasan pers yang disertai tanggungjawab kepada kepentingan masyarakat akan membuat rakyat lebih suka dengan kondisi bangsanya sendiri.

Ketahanan politik dalam negeri juga sangat ditentukan oleh pelaksanaan desentralisasi dan pemberian otonomi kepada daerah. Kondisi umat manusia sekarang sangat merangsang perkembangan etnik.

Padahal di Indonesia ada lebih dari 950 golongan etnik yang juga ingin mencapai kemajuan. Sempitnya peluang bagi daerah dan golongan etnik untuk mengembangkan dirinya akan menimbulkan ketidakpuasan. Hal itu dengan mudah dapat dimanfaatkan kekuatan luar yang bermaksud kurang baik terhadap Indonesia. Walaupun demikian, bersamaan dengan pemberian otonomi luas kepada daerah, perlu juga ditimbulkan kesadaran bahwa lebih baik bagi setiap golongan untuk tetap berada dalam lingkungan Republik Indonesia ketimbang memisahkan diri. Setiap sarana yang dapat mempersatukan bangsa harus dimanfaatkan untuk menumbuhkan kesadaran itu, seperti sarana komunikasi, transportasi kebijaksanaan pemerintah pusat yang arif bijaksana, efektivitas ABRI dalam menjalankan fungsinya, terutama fungsi teritorial dan kepolisian.

Di samping itu, politik luar negeri yang bebas aktif harus tetap dijaga. Tugas internasional yang harus dilakukan bangsa Indonesia sesuai dengan kehendak UUD 1945 dilakukan dengan penuh dinamika, dengan memelihara kemandirian bangsa dan tanpa sikap konfrontatif terhadap bangsa lain. Sebaliknya, justru selalu diusahakan kemitraan dengan bangsa lain untuk memperoleh manfaat bersama yang saling menguntungkan. Indonesia sebagai anggota ASEAN mengusahakan agar anggota ASE-

AN makin erat hubungannya dalam semua bidang kehidupan, tanpa melepas kedaulatan negara masing-masing.

Di samping itu, Indonesia masih berperan penting dalam Gerakan Non Blok untuk memajukan kehidupan sekian banyak bangsa di dunia. Dalam hubungannya Indonesia mengusahakan kerjasama yang makin erat antara semua anggota GNB, dan antara anggota GNB dengan bangsa Utara yang sudah maju. Dalam lingkungan Organisasi Konferensi Islam (OKI) Indonesia merangsang persatuan bangsa-bangsa yang tergabung di dalamnya serta kemajuan umat Islam di dunia. Sebagai anggota APEC diperjuangkan agar semua sasaran yang telah ditetapkan di Bogor pada tahun 1994 dapat terwujud pada waktunya.

Keadaan sekarang masih belum sesuai dengan kondisi yang diinginkan. Terutama mengenai kondisi politik dalam negeri. Pelaksanaan demokrasi Pancasila masih memerlukan cukup banyak penyempurnaan dan peningkatan. Kekuasaan hukum masih jauh dari yang diharapkan. Pemberian otonomi darah baru pada tahap permulaan. Fungsi pers masih jauh dari bebas dan jauh dari bertanggungjawab. Ini semua perlu perbaikan kalau kita menginginkan ketahanan politik yang memadai.

Wujud Ketahanan Ekonomi

Ketahanan ekonomi merupakan hal yang tidak kalah pentingnya, dengan ketahanan di bidang lainnya, apalagi mengingat sekarang persaingan ekonomi dalam lingkungan internasional makin keras. Memang di pihak lain juga makin kuat tantangan untuk mengadakan kerjasama ekonomi, tetapi kemitraan hanya dapat bersifat seimbang kalau masing-masing mempunyai cukup daya saing. Kalau tidak, malahan terwujud kemitraan yang berat sebelah.

Ketahanan ekonomi merupakan kenyataan kalau bangsa Indonesia pandai bekerja sama dan bersaing dalam bidang ekonomi dengan bangsa-bangsa lain. Itu memerlukan produktivitas yang tinggi yang menghasilkan produksi dalam jumlah besar. Hasil produksi itu dapat dipasarkan dengan baik di dalam maupun luar negeri jika mempunyai mutu yang tinggi dan harga yang menarik. Penjualan hasil produksi yang baik akan mendatangkan penghasilan yang baik bagi semua pihak yang ikut serta dalam proses produksi maupun pemasaran. Dengan demikian ada distribusi penghasilan cukup merata sehingga kesenjangan antara kaya dan miskin dapat ditekan pada batas kewajaran.

Agar produksi terus berkembang, terutama untuk menambah kesempatan kerja bagi tenaga kerja yang setiap tahun meningkat seki-

tar 2 juta orang, perlu ada investasi yang dilakukan secara teratur. Daya tarik terhadap investor dalam dan luar negeri timbul kalau kekuasaan hukum berjalan, ada pengaturan pemerintah yang memudahkan investasi, ada kemampuan bekerja yang bermutu dari tenaga kerja Indonesia dan suasana masyarakat baik dan mendukung.

Peningkatan jumlah dan mutu hasil produksi perlu selalu menjadi perhatian agar barang buatan Indonesia dapat menjadi raja di pasarnya sendiri dan sebaliknya dapat memasuki pasar bangsa lain. Untuk itu berbagai potensi alam Indonesia yang menyediakan aneka ragam bahan baku serta peluang harus dapat dimanfaatkan secara maksimal dalam peningkatan produksi.

Berhubung adanya berbagai keterbatasan, tentu tidak semua barang yang kita perlukan dapat kita buat sendiri. Jika dianggap kurang bijaksana untuk memproduksi barang tertentu maka lebih baik mengimpor dari negara lain. Namun harus selalu dijaga agar ketergantungan kita terhadap luar negeri tidak berlebihan besarnya. Apalagi ketergantungan itu terjadi pada negara yang nampaknya kurang bersahabat atau ada kecenderungan tidak bersahabat terhadap Indonesia. Untuk dapat mengimpor sesuai dengan keperluan, kita harus mempunyai cukup devisa untuk membiayainya. Oleh sebab itu, kita harus dapat melaku-

kan ekspor dalam jumlah besar.

Harus diusahakan agar ada pemerataan produksi dilihat dari sudut daerah. Jangan ada daerah yang terlalu dirangsang dan disediakan peluang agar produksi di setiap daerah berkembang.

Pada waktu ini, ekonomi Indonesia masih dapat memetik manfaat dari perbedaan tingkat upah dengan negara maju. Karena itu masih banyak perusahaan dari negara maju pindah ke Indonesia untuk memanfaatkan tingkat upah yang lebih rendah. Akan tetapi makin terasa pula, kenaikan upah di Indonesia berbarengan dengan meningkatnya ekonomi nasional. Akibatnya Indonesia mulai kehilangan posisi rendahnya upah dibandingkan dengan negara seperti Bangladesh, Vietnam dan Myanmar. Oleh sebab itu peran teknologi dalam produksi dan pendidikan di Indonesia harus ditingkatkan untuk menghasilkan tenaga kerja yang makin tinggi kecakapannya. Dengan peningkatan peran teknologi diusahakan agar nilai tambah dalam seluruh proses produksi meningkat. Itu hanya dapat dicapai dengan tenaga kerja yang lebih tinggi kecakapannya. Hasil produksi dengan nilai tambah tinggi mempunyai peluang lebih banyak untuk menghasilkan daya saing di pasar nasional dan internasional.

Peran perusahaan sangat besar dalam menghasilkan produksi yang diinginkan. Sesuai dengan fasal 33

UUD 1945 ada sektor produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dan karena itu harus dikuasai pemerintah. Untuk itu pemerintah dapat mengadakan BUMN yang menjalankan produksi itu atau dapat melakukan penguasaan dengan cara pengaturan, sedangkan produksi dilakukan oleh perusahaan swasta atau koperasi.

Kalau digunakan BUMN maka harus diusahakan agar perusahaan itu dapat dikelola secara efektif dan efisien sesuai dengan tuntutan manajemen perusahaan, dan tidak menjadi perusahaan yang manajemennya birokratis yang kurang efektif dan tidak efisien. BUMN tidak boleh kalah tingkat efektivitas dan efisiensinya dari perusahaan swasta, hal mana dapat dicapai kalau ada pelaksanaan manajemen yang baik.

Perusahaan besar mempunyai peran yang penting dalam meningkatkan besarnya ekonomi nasional serta daya saingnya. Oleh karena itu, perlu diusahakan agar perusahaan besar itu bertambah jumlahnya, baik dalam bentuk BUMN maupun swasta dan koperasi. Akan tetapi harus dijauhan pemberian monopoli, karena mempunyai pengaruh buruk kepada perkembangan ekonomi dan perusahaan itu sendiri. Meskipun peran perusahaan besar penting, namun yang lebih penting adalah kehadiran perusahaan kecil dan menengah dalam jumlah besar dan dengan mutu yang tinggi. Perusa-

haan kecil dan menengah itu dapat berupa koperasi atau swasta. Terbukti dari keadaan negara lain yang telah lebih dulu maju, mutu dan keuletan perusahaan kecil dan menengah menentukan ketahanan ekonomi nasional.

Harus selalu diusahakan membesarnya ekonomi nasional melalui pertumbuhan yang tinggi dan kontinyu. Akan tetapi lebih penting lagi adalah pemerataan dalam distribusi kekayaan sehingga kesenjangan antara kaya dan miskin menjadi kecil. Oleh sebab itu, sistem ekonomi yang digunakan merupakan kombinasi dari ekonomi berorientasi pasar dan ekonomi dengan azas kekeluargaan. Sebab sesuai dengan ketentuan UUD 1945 kita harus menegakkan ekonomi dengan azas kekeluargaan agar tercipta pemerataan dalam kekuatan ekonomi. Dengan melihat pada pengalaman bangsa-bangsa lain, kita perlu menggunakan sistem ekonomi yang berorientasi pasar untuk menciptakan ekonomi nasional yang besar, efisien dan dapat memanfaatkan potensi bangsa yang tersedia. Itu berarti bahwa ekonomi Indonesia tidak hanya diserahkan pada kekuatan pasar saja yang hanya menguntungkan pihak yang sudah kuat lebih dulu, tetapi ada peran pemerintah untuk melakukan pengaturan yang menjamin keadilan. Namun pengaturan pemerintah itu tidak boleh begitu jauh sehingga merugikan dan menghambat jalannya eko-

nomi. Sebaliknya, pengaturan pemerintah harus mendorong tumbuhnya ekonomi nasional serta terwujudnya daya saing internasional yang memadai.

Kondisi sekarang belum dapat dikatakan sesuai dengan keadaan yang diinginkan. Sekalipun semua pihak mengatakan bahwa kita menggunakan UUD 1945 sebagai landasan, namun tidak jelas bagaimana penerapan azas kekeluargaan yang dimaksud, sehingga, dalam kenyataan ekonomi Indonesia lebih bersifat kapitalistis. Itu mempunyai akibat leburnya kesenjangan antara golongan kecil yang sangat kaya dengan mayoritas bangsa yang amat terbatas penghasilannya. Di samping itu belum nampak adanya pembatasan terhadap monopoli yang diberikan kepada beberapa perusahaan besar. Padahal perusahaan kecil dan menengah masih kurang berkembang. Daya saing dari banyak usaha ekonomi masih kurang memadai, antara lain disebabkan oleh ekonomi biaya tinggi, manajemen yang kurang cakap serta mutu sumberdaya manusia yang kurang memadai.

Ketahanan Sosial Budaya

Ketahanan budaya tidak kalah pentingnya dalam menjamin ketahanan nasional Indonesia. Bahkan mungkin ketahanan budaya lebih penting karena mempunyai pengaruh besar terhadap sikap hidup

dan perilaku masyarakat Indonesia dalam melaksanakan berbagai kegiatan lainnya.

Kebudayaan nasional Indonesia masih dalam proses perkembangan. Dalam UUD 1945 tercantum bahwa kebudayaan nasional Indonesia terbentuk dari puncak-puncak kebudayaan setiap daerah ditambah dengan usaha untuk mengambil aspek budaya bangsa lain yang bersifat positif untuk mewujudkan kebudayaan nasional. Sebab sebelum bangsa Indonesia merdeka yang ada baru kebudayaan setiap suku bangsa. Sejak proklamasi kemerdekaan terwujud bangsa Indonesia yang kemudian membangun kebudayaannya.

Pada waktu ini terjadi usaha yang sangat kuat dari bangsa lain untuk menjadikan kebudayaannya mendominasi dunia. Setelah usainya Perang Dingin ada pendapat di dunia Barat bahwa yang akan menggantikan adalah Benturan Peradaban (*Clash of Civilizations*). Benturan Peradaban itu digambarkan sebagai benturan antara peradaban Barat dengan peradaban non-Barat, khususnya Islam dan Asia Timur. Meskipun di Barat sendiri pendapat itu disanggah, tetapi dalam kenyataan banyak orang berpikir dan bersikap seperti itu. Karena peradaban diwujudkan sebagai hasil utama kebudayaan, atau malahan ada yang mengatakan bahwa peradaban dan kebudayaan adalah tidak berbeda, maka dapat dimengerti bahwa sekarang

dunia Barat melakukan usaha penetrasi yang luas kepada dunia non-Barat, termasuk Indonesia.

Penetrasi yang dilakukan dengan memanfaatkan berbagai sarana yang tersedia memang amat efektif dan dapat merugikan perkembangan kebudayaan nasional Indonesia. Pertama, harus disadari bahwa dunia Barat, khususnya Amerika Serikat, populer di banyak kalangan di Indonesia. Malahan banyak orang terpesona terhadap segala hasil kebudayaan Barat, dari mulai ilmu pengetahuan dan teknologinya sampai kepada sistem politiknya dan bahkan pandangan hidupnya. Ini disebabkan oleh sejarah penjajahan yang dialami bangsa Indonesia dan gambaran umum tentang kehidupan di dunia Barat. Itu diperkuat lagi oleh kemenangan Barat dalam Perang Dunia Kedua dan kemudian Perang Dingin. Ini semua menimbulkan persepsi pada banyak orang Indonesia yang amat menguntungkan dunia Barat, tetapi, sebaliknya, merugikan ketahanan nasional Indonesia. Sebab hal demikian pada akhirnya akan berpengaruh pula terhadap pandangan politik dan ekonominya, sehingga sangat bermanfaat bagi kepentingan Barat tetapi belum tentu demikian buat Indonesia.

Untuk menghadapi penetrasi yang agresif dari kebudayaan Barat harus diadakan pembudayaan Pancasila yang jauh lebih kongkrit dalam masyarakat Indonesia. Se-

karang kita sudah sering kali melakukan penataran P4, tetapi pengalaman hal-hal yang dibicarakan dalam penataran itu masih amat langka. Sudah waktunya kepemimpinan nasional menegaskan pengalaman nilai-nilai Pancasila dalam seluruh kehidupan bangsa. Yang diperlukan bukan indoktrinasi, tetapi tauladan dari pemimpin dan yang dituakan.

Oleh karena itu kita hidup dalam kondisi globalisasi yang merupakan produk dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern yang terutama dihasilkan oleh dunia Barat, maka perkembangan budaya Pancasila tidak dapat mengabaikan Barat. Pancasila harus mampu melakukan sintese dengan nilai Barat justru untuk menjamin kelangsungan Pancasila. Itu serupa dengan yang dilakukan bangsa Indonesia di masa lampau ketika Hindu, Buddha dan Islam masuk Indonesia. Sintese itu dicapai secara sadar mengambil nilai-nilai Barat yang bermanfaat bagi perkembangan Pancasila.

Dalam konteks ini, keluarga dapat menjadi benteng kebudayaan Indonesia. Sebab dalam keluarga dibentuk kepribadian manusia Indonesia sejak lahir. Oleh sebab itu penting sekali diadakan pendidikan terhadap para orang tua agar dapat menjadi pemimpin keluarga yang baik serta mendidik dan membina anak-anaknya dengan semestinya.

Penetrasi budaya bisa juga

menggunakan aspek agama. Sebab agama dapat membawa nilai-nilai dan sikap hidup tertentu. Bahkan apabila bersikap destruktif, melalui agama dapat diciptakan perpecahan dalam masyarakat yang amat emosional dan tajam. Oleh sebab itu, bangsa Indonesia harus amat waspada terhadap usaha demikian yang datang dari luar maupun dari dalam. Toleransi antaragama, yang menjadi sifat bangsa Indonesia, harus terus dipelihara dan dijaga jangan sampai dapat dikendorkan oleh usaha orang lain. Semua agama diberikan kesempatan luas untuk berkembang asalkan menjalankan ajarannya yang benar dan mengajak umatnya untuk meningkatkan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kalau semua umat agama menjalankan ajaran agamanya dengan baik pasti tidak ada perpecahan antara mereka. Sebab tidak ada ajaran agama yang mengajar orang untuk berselelah. Malahan menjalankan agama dengan baik sangat penting dilihat dari berbagai sudut, seperti terpeliharanya moralitas yang tinggi, terwujudnya disiplin dan etos kerja yang kuat, dan lainnya.

Melihat kondisi masyarakat Indonesia sekarang masih sangat banyak yang perlu dikerjakan. Pangamalan Pancasila jauh dari memadai dan belum ada cukup tauladan dari para pemimpin dan semua pihak yang dituakan. Kondisi kebanyakan keluarga masih kurang memuaskan, termasuk ke-

uarga orang berada. Itu disebabkan karena para orang tua masih belum cukup kesadarannya untuk mendidik dan membina anak-anaknya dengan semestinya. Hubungan antaragama sudah menunjukkan kemajuan tetapi toh masih sangat perlu ditingkatkan. Sedangkan pelaksanaan kehidupan beragama menunjukkan perkembangan yang amat menonjol dilihat dari sudut kuantitas, namun masih kurang menyentuh kepada substansi ajaran agama dan lebih tertuju kepada aspek luarnya dan ritual saja. Dalam kehidupan sehari-hari belum cukup tampak hasil kehidupan agama, seperti disiplin yang masih rendah.

Wujud Ketahanan Pertahanan-Keamanan

Kalau kita bicara tentang ketahanan dalam pertahanan-keamanan, maka yang kita tuju adalah satu kondisi pertahanan-keamanan yang tidak hanya kuat dari segi lahiriahnya, tetapi juga mengandung kekuatan batin yang kemudian terwujud dalam bentuk keuletan. Ada negara yang mempunyai pertahanan-keamanan yang nampaknya kuat dan hebat, dengan menonjolkan berbagai sistem senjata mutakhir dan canggih, akan tetapi ketika menjalankan pertempuran tidak mampu bergerak lincah dan mobil serta tidak tahan lama beroperasi dengan mutu yang baik.

Di Indonesia syarat pertama

untuk ketahanan hankam adalah hubungan yang dekat dan erat antara ABRI dengan rakyat. Kita menganut Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta yang memberikan peran penting sekali kepada rakyat dan ABRI bersama-sama. Karena itu hubungan yang dekat dan erat antara ABRI-Rakyat itu mutlak bagi ketahanan hankam.

Selain itu, kondisi sosial bangsa harus terjamin kekuatannya, yaitu sesuai dengan persyaratan ketahanan ideologi, politik, ekonomi dan sosial-budaya. Kalau terjadi perpecahan politik yang gawat, kesenjangan yang lebar antara kaya dan miskin atau pemihakan yang meluas kepada nilai-nilai asing pasti tidak ada kondisi sosial bangsa yang kuat. Kekuatan rakyat dalam pertahanan-keamanan sangat ditentukan oleh kondisi itu.

Dalam lingkungan ABRI harus ada moralitas yang tinggi dan adanya kepemimpinan yang memelihara kekompakannya serta efektivitasnya sebagai organisasi. Di samping itu fungsi teritorial harus pula dilakukan dengan baik sehingga hubungan antara ABRI dan masyarakat selalu terpelihara. Dengan begitu ABRI dan masyarakat dapat saling mempengaruhi dalam arti positif.

Melihat kondisi internasional, maka hankam perlu mempunyai kemampuan untuk menangkal subversi. Untuk itu fungsi teritorial ABRI harus dijalankan secara efektif dengan selalu mengikutsertakan

rakyat. Selain itu fungsi kepolisian harus makin mampu mengatasi gangguan kriminalitas yang makin hari makin meningkat kualitasnya dan bahkan juga jumlahnya. Kondisi kriminalitas, secara langsung atau tidak langsung, akan mempengaruhi tingkat ancaman subversi.

Sesuai kemampuan ekonomi nasional perlu dibangun kemampuan konvensional di darat, laut dan udara untuk menghadapi kemungkinan ancaman militer yang bersifat konvensional. Yang terutama perlu diperhatikan adalah kemampuan menguasai lautan yang menjadi wewenang Indonesia, yaitu lautan teritorial dan zone ekonomi eksklusif. Hal ini mengingat lautan mempunyai makna ekonomi dan hankam yang diperlukan setiap saat meskipun tidak ada ancaman dari luar.

Selanjutnya kita juga perlu meningkatkan kemampuan menghadapi serangan udara dan peluru kendali dengan cara pengembangan kemampuan udara dan peroketan kita sendiri. Hal ini penting untuk menangkal ofensif pihak lawan yang bermaksud untuk melunakkan daya tahan masyarakat kita. Kalau musuh kemudian berhasil mendaratkan kekuatannya di wilayah Indonesia, maka kita harus dapat mengalahkannya dengan kekuatan konvensional di darat. Selain itu masyarakat yang makin maju memerlukan pendekatan teritorial yang berbeda dari masa lam-

pau. Untuk itu organisasi teritorial ABRI masih harus melakukan penyesuaian lebih baik. Untuk memperkuat gerakan konvensional di darat itu harus pula diadakan operasi gerilya terhadap setiap kedudukan musuh yang telah dipainya. Perlawanan gerilya diperlukan untuk memungkinkan pelaksanaan ofensif pembalasan yang memenangkan perjuangan kita. Ini adalah Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta yang merupakan doktrin hankam Indonesia.

Kondisi sekarang masih cukup jauh dari yang diinginkan, yang terlihat masih adanya borok-borok yang melemahkan tubuh bangsa. ABRI sendiri sebagai unsur masyarakat tidak bebas dari gangguan penyakit. Melihat kondisi itu nampaknya sukar ditolak masuknya subversi dalam tubuh bangsa kita. Hal ini yang harus menjadi perhatian ketahanan hankam pada instansi pertama.

Wujud Ketahanan Aspek Alamiah

Ketahanan Aspek Sosial harus dibarengi dengan Ketahanan Aspek Alamiah.

Untuk faktor geografi yang harus kita perhatikan adalah pemanfaatan sifat negara kepulauan yang terletak di posisi silang yang amat strategis. Jangan sampai lautan dan ruang angkasa serta wilayah daratan Indonesia justru lebih dimanfaatkan bangsa lain untuk

peningkatan kesejahteraannya dan bahkan keamanannya. Posisi silang yang kita miliki harus selalu dalam kekuasaan kita sendiri untuk memberikan manfaat maksimal bagi kita.

Faktor penduduk mengharuskan kita untuk mencegah jangan sampai terjadi penambahan yang terlalu memberatkan kita dalam berbagai hal, seperti penyediaan makan dan pendidikan. Kita memang sudah berhasil, sekurangnya di atas kertas, untuk membatasi pertumbuhan penduduk menjadi 1,8 persen. Namun akan lebih baik lagi kalau angka itu diturunkan menjadi 1 persen. Jumlah penduduk yang besar dapat merupakan aset kalau mutunya cukup memadai; sebaliknya kalau mutunya rendah justru menjadi kerawanan. Untuk itu diperlukan pendidikan nasional yang jauh lebih bermutu dibandingkan yang kita miliki sekarang. Selain itu faktor penyebaran penduduk juga harus diperhatikan. Penyebaran penduduk yang lebih merata akan meningkatkan ketahanan nasional, baik dilihat dari sudut kesejahteraan maupun keamanan. Sekarang penduduk terlalu menumpuk di pulau Jawa, yaitu sekitar 60 persen jumlah penduduk Indonesia ada di pulau Jawa yang hanya sekitar 7 persen wilayah daratan Indonesia. Tetapi proses penyebaran tersebut penduduk tersebut harus juga memperhatikan respons dari penduduk di daerah yang hendak diisi dengan

penduduk baru.

Dalam faktor Kekayaan Alam harus ada usaha bangsa Indonesia untuk lebih memanfaatkan kekayaan alam yang tersimpan dalam bumi dan lautan Indonesia. Apabila tidak kita lakukan, maka pasti bangsa lain yang melakukan. Hal

itu akan mendatangkan kerugian besar bagi rakyat Indonesia, sebagaimana telah dialami dalam masa penjajahan dahulu kala. Peningkatan mutu penduduk sangat mempengaruhi kemampuan pemanfaatan kekayaan alam.